



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN DIREKTUR UTAMA PT PGN, Tbk**

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke – 15 (Lima Belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama PT PGN, Tbk
Hari, tanggal	: Senin, 10 Februari 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 16.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: 1. Strategi bisnis dan kinerja PT PGN, Tbk Tahun 2020 ditengah opsi penurunan harga gas 2. Progres pengelolaan gas alam cair (LNG) 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 26 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 9 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin 16 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan.

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, 10 Februari 2020 dibuka pukul 13.15 WIB yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Strategi bisnis dan kinerja PT PGN, Tbk Tahun 2020 ditengah opsi penurunan harga gas
 - b. Progres pengelolaan gas alam cair (LNG)
 - c. Lain-lain
3. Komisi VII DPR RI ingin memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif dari Direktur Utama PT PGN, Tbk diantaranya mengenai:
 - 1) Pada saat ini pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi pada *level* 5%. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh faktor konsumsi. Disisi lain, Investasi dan Ekspor-Impor belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat daya saing produk-produk manufaktur, petrochemical, baja serta industri lainnya yang berbasis gas bumi masih sangat rendah, sehingga belum mampu bersaing di pasar global.
 - 2) Rendahnya *competitiveness* industri yang berbasis bahan baku gas seperti industri pupuk, petrochemical, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet seperti yang termaktub dalam Perpres No. 40 Tahun 2016 menjadi perhatian khusus Presiden RI. Karena itu, Presiden RI menginstruksikan agar harga gas dalam waktu 3 bulan kedepan untuk tujuh industri tersebut harus turun menjadi US\$ 6 per mmbtu.
 - 3) Dalam perspektif ekonomi, penurunan harga gas, sejatinya bisa berdampak positif terhadap perekonomian karena diproyeksikan mampu meningkatkan daya saing industri dan berpotensi besar

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, tetapi disisi lain kondisi tersebut bisa menjadi kendala dan dilema bagi PGN dalam pengembangan bisnis kedepan, mengingat sejatinya PGN membutuhkan *adjustment* harga gas bumi seperti yang diusulkan PGN kepada Pemerintah pada bulan November 2019.

5. Penjelasan Direktur Utama PT PGN, Tbk sebagai berikut :

a. Rencana Strategis PGN 5 Tahun Kedepan

PGN telah merumuskan dan menetapkan rencana strategis sampai dengan 2024 sebagai berikut:

- 1) Penguatan & perluasan pengelolaan hilir gas (gas pipa, cng, lng) domestik
- 2) Restrukturisasi bisnis dan *portfolio*
- 3) Sinergi bisnis (bumn, *global player*, swasta, bumd)
- 4) Ekspansi bisnis internasional

b. Rencana Kerja Utama PGN Tahun 2020

- 1) Infrastruktur Gas: 267 KM Pipa Transmisi, 186 KM Pipa Distribusi, 53 Unit*) LNG Terminal/Mini LNG, 1 Unit LNG *Refilling* (1 unit sedang dibangun di Teluk Lamong dan 52 lokasi penugasan sedang dibahas implementasinya bersama PLN), 316 Ribu Jargas Rumah Tangga
- 2) Sektor Pengguna: Industri-650 Pelanggan baru, Kilang Balongan, Cilacap 2 Unit, Gasifikasi Pembangkit Listrik 52 lokasi, Rumah Tangga di 49 Kabupaten/Kota 266 Ribu APBN, 50 Ribu mandiri

c. Target Kinerja Operasional Tahun 2020

Pada tahun 2020, PGN menetapkan target pertumbuhan pada volume pengelolaan di bidang usaha utama gas bumi sebagai berikut:

- 1) Kinerja volume distribusi (niaga) naik 3% dari semula 949 Bbtud menjadi 980 Bbtud.
- 2) Kinerja volume transmisi (pengangkutan) naik 1% dari 1.369 MMscfd menjadi 1.377 MMscfd.
- 3) Kinerja volume regasifikasi naik 5% dari semula 120 Bbtud menjadi 126 Bbtud

- d. Mekanisme Implementasi PERPRES 40/2016 (PERMEN ESDM Nomor 16/2016 – Tata Cara Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu) yaitu:

Penetapan harga gas bumi tertentu kepada pengguna gas bumi dilakukan melalui mekanisme penyesuaian harga gas bumi yang dibeli kontraktor dengan tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian kontraktor (Pasal 5 ayat 1. Jo Pasal 6 ayat 1).

Badan Usaha wajib melakukan penyesuaian harga gas bumi yang dijual kepada pengguna gas bumi sesuai dengan penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor (Pasal 5 ayat 3).

- 1) PGN berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KESDM, BPH Migas, SKK Migas, Pertamina dan Kementerian BUMN sehubungan dengan rencana implementasi Perpres 40/2016.
- 2) Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa laporan atas Perhitungan dan Kajian akan disampaikan ke Pemerintah serta Pemerintah yang akan memutuskan pelaksanaannya.
- 3) Bahwa dalam pelaksanaan Perpres 40/2016, PGN akan tetap menjalankan “bisnis dengan keekonomian yang baik” serta “berkelanjutan” untuk terus melakukan upaya percepatan & perluasan gas bumi dalam negeri demi mencapai target RUEN & KEN.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PGN Tbk. untuk melaksanakan amanat Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan harga Gas Bumi dengan cermat sehingga mekanisme penurunan harga gas bumi melalui opsi pengurangan penerimaan negara di sektor hulu tetap menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan badan usaha hilir gas bumi.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT PGN Tbk. untuk segera menindaklanjuti permasalahan kebocoran jaringan gas pipa di Kalimantan Utara dan wilayah lainnya di Indonesia.

3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirut PT PGN Tbk. untuk memperkuat implementasi penugasan dari Pemerintah dalam mengelola wilayah jaringan distribusi dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur gas.
4. Komisi VII DPR RI mendukung PT PGN Tbk. untuk memasarkan LNG dari sumber-sumber hulu, berperan sebagai *bidder* untuk proses-proses tender spot LNG tujuan ekspor yang dijalankan oleh KKKS, serta sebagai pelaksana bisnis LNG domestik dan internasional.
5. Komisi VII DPR RI mendukung PT PGN Tbk. untuk menjaga kelangsungan bisnis usaha hilir gas bumi melalui biaya pengelolaan infrastruktur dan margin usaha yang wajar sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
6. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PGN Tbk. untuk memastikan secara realistis penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur LNG untuk 52 titik pembangkit listrik PLN hingga awal tahun 2022.
7. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PGN Tbk. agar dalam pembangunan infrastruktur untuk bersinergi dengan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
8. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PGN Tbk. untuk menyampaikan laporan kinerja seluruh portofolio, sumber pembiayaan, nilai kegiatan dan lokasi pembangunan infrastruktur serta jaringan gas bumi secara terperinci dan detail dalam lima tahun terakhir.
9. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PGN Tbk. untuk mensosialisasikan program pembangunan jaringan gas bumi sehingga menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
10. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PGN Tbk. untuk menyediakan roadmap program virtual pipeline sebagai salah satu bentuk percepatan gasifikasi di wilayah Indonesia Timur paling lambat 17 Februari 2020.

11. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PGN Tbk. untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 17 Februari 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.45 WIB

Jakarta, 10 Februari 2020

KETUA RAPAT,

**DIREKTUR UTAMA
PT PGN, Tbk**

GIGIH PRAKOSO SOEWARTO

**SUGENG SUPARWOTO
A-373**